

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU - BUKU

- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.138.
- Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2015. hlm.21
- Black's Law Dictionary with Pronunciation, 1983, Minn West Publishing co, St. Paul, hlm. 182.
- Djaja Ermansyah, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Jakarta : Sinar Garafika, 2009
- KPK RI, *Kapita Slekta dan beban biaya social Korupsi*, KPK, 2015 Hal.3
- Mahrus Ali, *Asas, teori dan praktek Hukum pidana korupsi*, Yogyakarta :UII Press, 2013 hal.72
- Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta : LP3ES, 1985, halaman 16
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, CV Pustaka Setia, Jakarta, 2012, Hlm.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 1.
- Mulyati pawannei, dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta :2015, Mitra Wacana Media, hlm.9
- Nurdjanah, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, 2009. hlm.13
- Nurjana, *Sisitem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta : 2010, Pustaka pelajar, Hml.17
- Robert Klitgaard, 1998, *Memahami Korupsi*, terjemahan Hermoyo, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 19.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : 2014, PT Citra aditya bakti, hlm.191
- Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1998. hlm. 11
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 52.
- Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 3
- Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan:

- pustaka, Bangsa Press, 2005, hlm. 26.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.54.
- Zainuddin Ali, *Filsafat hukum*, Jakarta : 2009, Sinar Grafika, hlm.94
- AdjiIndriyanto Seno, *Korupsi kebijakan aparatur negara dan hukum pidana*, CV Diadit Media, Jakarta, 2009.
- ArsyadJawade Hafidz, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Chazami Adami, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014.
- Djaja Ermansjah, *Memberantas korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Efendy Marwan, *Diskresi Penemuan Hukum, Korporasi Dan Tax Amnesty Dalam Penegak Hukum*, Referensi, Yogyakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Diterbitkan Sinar Grafika, Cetakan kedua, Jakarta, 2008.
- M. Semma, *Negara dan korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, 2008, Hal 32
- Makawimbang Hernold Ferry, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thefa Media, Yogyakarta, 2014. *Lex Crimen* Vol. IV/No. 2/April/2015
- Mukantarno Rudi Satrio, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, 2008.
- A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.2010. hlm. 103
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

## **B. SITUS INTERNET**

<http://www.google.co.id/amp/s/sundarinita.wordpress.com/2012/05/23/korupsi/amp/>  
diakses 25-Mei-2020

<http://www.google.co.id/amp/www.bombastis.com/korupsi-sejakMajapahit/79214/amp>. diakses 25-Mei-2020

[https://kumparan.com/kumparannews/kaleidoskop-2019-5-kasus-korupsi-dengan nilai-terbesar-1sWzDbLTGiv](https://kumparan.com/kumparannews/kaleidoskop-2019-5-kasus-korupsi-dengan-nilai-terbesar-1sWzDbLTGiv) diakses 28 Maret 2020

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht> diakses 28-Maret-2020.  
Ip3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/definisi-penelitian-metode-dasar.html?m=1.diakses tanggal 28-Juni-2020

## **C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANG**

Republik Indonesia Undang – Undang Dasar Tahun 1945

Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 37/T.4/88/66/Pid tanggal 12 Januari Tahun 1988

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/8/1988